

## **ABSTRAK**

### ***CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

**Oleh**

**HARIDOTAMA**

*Civil Society Organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia terkhusus di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus memiliki 37 LSM. Secara kuantitatif menunjukkan LSM memenuhi kategori cukup, dan Secara Kualitatif mencerminkan adanya kebebasan dan antusiasme berekspresi. Lebih lanjut, terdapat kategori status LSM terbagi menjadi 2 yaitu 13 LSM aktif dan 24 LSM non-aktif, data ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan *civil society organization* terdapat juga permasalahan pada LSM di Kabupaten Tanggamus yakni minimnya keaktifan LSM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang melibatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, LSM, serta Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tanggamus dan studi dokumentasi terkait dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) meliputi jaringan sosial, kepercayaan dan norma-norma dan teori agensi oleh John Meckling (2019) meliputi Pola Hubungan yaitu otonomi, fasilitasi dan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan LSM sebagai infrastruktur demokrasi di Kabupaten Tanggamus masih memiliki kondisi modal sosial yang lemah, selain itu pola hubungan yang kurang optimal dengan pemerintah sehingga berpengaruh terhadap ketidakaktifan LSM baik secara administratif maupun keorganisasiannya. Selanjutnya LSM di Kabupaten Tanggamus masih memiliki hambatan-hambatan diantaranya dalam jaringan Sosial, Kepercayaan, norma-norma, otonomi, fasilitasi dan kolaborasi. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji penyebab ketidakaktifan sebagian besar LSM menggunakan perspektif modal sosial dan agensi demokrasi meliputi Pola Hubungan. Selain itu juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pada LSM. Berdasarkan hal tersebut modal sosial dan pola hubungan LSM masih sangat perlu untuk ditingkatkan agar dapat kembali mendorong pembangunan demokrasi ditingkat lokal khususnya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Kata Kunci: *Civil Society Organization*, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pembangunan Demokrasi.

## **ABSTRACT**

### **CIVIL SOCIETY ORGANIZATION AND DEMOCRACY DEVELOPMENT IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN TANGGAMUS DISTRICT IN 2024**

**By**

**HARIDOTAMA**

Civil Society Organizations (CSOs) or Non-Governmental Organizations (NGOs) currently play a significant role in shaping the democratic landscape in Indonesia, particularly in Tanggamus Regency. According to data from the Tanggamus Regency Office of National Unity and Politics in 2024, Tanggamus Regency has 37 NGOs. Quantitatively, this indicates that NGOs are sufficiently present, and qualitatively, it reflects a degree of freedom and enthusiasm for expression. Furthermore, NGOs are categorized into two statuses: 13 active NGOs and 24 inactive NGOs. This data suggests that along with the development of civil society organizations, there are also challenges in Tanggamus Regency, namely the low activity level of NGOs. The methodology used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews involving the Office of National Unity and Politics, NGOs, and Community Organizations in Tanggamus Regency, as well as document studies related to the research focus. This study utilizes the social capital theory proposed by Putnam (2000), which includes social networks, trust, and norms, and the agency theory by John Meckling (2019), which includes the patterns of relationships such as autonomy, facilitation, and collaboration. The results of the research indicate that NGOs, as the infrastructure of democracy in Tanggamus Regency, still have weak social capital. Additionally, the suboptimal relationship patterns with the government affect the inactivity of NGOs both administratively and organizationally. Furthermore, NGOs in Tanggamus Regency face barriers including issues in social networks, trust, norms, autonomy, facilitation, and collaboration. The aim of this research is to examine the causes of the inactivity of most NGOs using the perspectives of social capital and democratic agency, including relationship patterns. Additionally, it seeks to identify the barriers faced by NGOs. Based on this, it is evident that the social capital and relationship patterns of NGOs need significant improvement to better support the development of democracy at the local level, particularly in Tanggamus Regency, Lampung Province.

**Keywords:** Civil Society Organizations, Non-Governmental Organizations and Democracy Development.